

## UPAYA PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENUMBUHKAN INOVASI SOSIAL

### REGIONAL GOVERNMENT EFFORTS IN GROWING SOCIAL INNOVATION

**Adi Suhendra dan Dyah Kusuma Wardani**

Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri

Jl. Kramat Raya No. 132 – Senen, Jakarta, Indonesia

No. Telp./Faks : +62 21 314 0454 HP: +62 822 4446 8840

e-mail: adisuhendra.pm@gmail.com

Diserahkan: 24/03/2018, Diperbaiki: 20/04/2018, Disetujui: 15/05/2018

#### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya paradigma baru dalam penyelesaian masalah dimasyarakat dalam lingkungan sosialnya. Pemerintah daerah melakukan berbagai terobosan untuk dapat menyelesaikan permasalahan itu dengan inovasi daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran upaya pemerintah dalam menyebarkan inovasi dalam penyelesaian masalah di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Teknik pengambilan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam, pengumpulan data sekunder, dan observasi. Sedangkan pengolahan data dilakukan dengan cara reduksi data. Alasan pemilihan metode ini adalah kajian ini merupakan kajian khusus yang memahami obyek ditelitinya secara khusus. Dengan metode ini, peneliti dapat melakukan pengamatan dan wawancara mendalam dengan subyek penelitian. Hasil yang di dapatkan adalah inovasi daerah dapat dijadikan sebuah cara baru terhadap upaya pemerintahan daerah dalam Menekan Angka Kematian Bayi, Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Wanita, Penanganan Inklusif Untuk Kaum Difabel.

**Kata Kunci:** Inovasi Sosial, Pemerintahan Daerah, Inovasi Daerah.

#### Abstract

*This research is driven by the existence of a new paradigm in solving problems in society in their social environment. Local governments make various breakthroughs to solve these problems with regional innovations. The purpose of this research is to determine the description of the government's efforts in spreading innovation in solving problems in the community. This study uses a qualitative case study approach. Triangulation of data sources is to explore the truth of certain information through various methods and sources of data acquisition. Data collection techniques are carried out by conducting in-depth interviews, secondary data collection, and observation. While data processing is performed by the data reduction. The reason for choosing this method is because this study is a special study that examined the research' subjects specifically. With this method, researchers can conduct observations and in-depth interviews with research subjects. The results shows that, regional innovations can be used as an efforts of regional governments in suppressing infant mortality, social protection and rehabilitation of women, and inclusive treatment for people with disabilities.*

**Keywords:** Social Innovation, Regional Government, Regional Innovation.

#### PENDAHULUAN

Penelitian ini mengkaji tentang upaya pemerintahan daerah dalam mensejahterakan masyarakatnya melalui inovasi sosial. Dalam penelitian ini, yang dimaksud inovasi sosial adalah berbagai cara baru, penggunaan alat baru dalam mengelola sebuah organisasi, pembuatan kebijakan baruyang dilakukan pemerintahan daerah kepada masyarakat (Choi & Majumdar 2015). Inovasi sosial ditujukan kepada aspek dalam pengentasan masyarakat dalam kategori kitdampaknya dalam

hal ekonomi dan sosial. Fenomena buram pada masyarakat yang kurang memiliki keekonomian dan sosial yang baik melahirkan konfigurasi tatanan sosial yang memposisikan kelompok yang tidak mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif sebagai bagian kelompok tertekan karena tersubordinasi dan terdiskriminasi (Tommy dan Sigit 1955).

Kini, negara-negara berkembang mulai berlomba-lomba untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Anggapan pemimpin dunia mulai berubah seiring dengan terbukanya pandangan mereka

terhadap isu-isu tentang kemanusiaan. Hal ini senada dengan para ahli pembangunan sosial yang menuntut antara pembangunan ekonomi dan sosial dilakukan secara seimbang. Ukuran kesejahteraan harus pula menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ukuran kesejahteraan suatu bangsa.

*The Sosial Progress Imperative* lembaga yang menilai kemajuan sosial (*Sosial Progress Index*) merilis indeks kemajuan sosial di seluruh dunia. Indeks kemajuan sosial dihimpun dari data sosial dan lingkungan untuk mengungkapkan kualitas hidup di masing-masing negara. Dari data yang dirilis oleh *Sosial Progress Imperative* tahun 2017 Indonesia menempati posisi ke 79 dari 128 negara yang dinilai. Indonesia mendapatkan skor 65.10. Nilai ini dikatakan baik apabila dihitung berdasarkan nilai pertahun. Tahun 2016 Indonesia berada di peringkat 82. Ini artinya tahun 2017 bisa dikatakan lebih baik. Bahkan jika dihitung dalam rentang selama 4 tahun terakhir, indeks kemajuan sosial Indonesia tumbuh secara substansial dari 63,01 sampai 65,1 indeks meningkat pada tingkat tahunan yang meningkat yang hingga posisi sekarang.

Namun demikian, peringkat Indonesia dalam indeks kemajuan sosial masih kalah jauh dengan negara tetangga. Dari laporan tersebut, Malaysia berada di peringkat 50, Thailand di posisi 62 dan Filipina pada ranking 68. Itu artinya jika dibandingkan negara Filipina, Indonesia masih tertinggal 11 tingkat, Thailand 17 tingkat dan Malaysia 29 tingkat.

Dampak dari tekanan tersebut, Indonesia mulai melakukan reformasi pemerintahannya sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Undang-undang tersebut memberi kerangka dasar bagi pemerintah pusat dalam melakukan pengaturan terhadap Pemda di Indonesia. Dengan adanya aturan tersebut, maka penataan organisasi terhadap berbagai elemen yang berkaitan dengan pemerintah daerah sebagai manifestasi dari otonomi daerah menjadi suatu yang tak bisa dihindari untuk merubah paradigma lama yang sentralistik menuju ke arah yang lebih desentralistik.

Apalagi sejak adanya Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah. Menurut Peraturan ini, Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud, maka sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing Daerah. Lebih lanjut dijelaskan dalam pembangunan daerah, dalam peraturan itu bentuk Inovasi Daerah meliputi inovasi

tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Selaras dengan tujuan diatas, desentralisasi atau otonomi daerah telah memberi peluang bagi pemerintah daerah dengan kewenangan yang dimilikinya berusaha memperkuat pelayanan publik yang berpihak pada kepentingan umum. Dengan adanya inovasi daerah, pemerintahan daerah dapat membuat inovasi-inovasi yang berguna bagi masyarakat terlebih dalam pembuatan inovasi sosial.

Dalam konteks itu, penelitian ini berusaha menggambarkan pelbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui inovasi daerah. Penelitian ini berusaha memotret bagaimana upaya Pemerintah daerah dalam usahanya untuk membantu masyarakat marginal. Dalam batasan penelitian ini, yang dimaksud masyarakat marginal adalah masyarakat yang tergolong dalam kelompok rentan, merupakan sekelompok orang yang terpinggirkan oleh tatanan kemasyarakatan, baik dalam bidang ekonomi, politik dan budaya, yang tidak berpihak pada mereka.

Seperti halnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Barat, kedua daerah ini sama-sama memiliki keterkaitan dalam membangun inovasi sosial walaupun nama dan jenis inovasinya masing-masing memiliki perbedaan. Sebagai contoh inovasi sosial yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. Inovasi Bebas Pasung Tanpa Re-Pasung Dinas Sosial memuat inovasi dengan menggunakan terapi pasung tanpa memasung lagi. Bahkan yang lebih mengesankan, mereka mendata masyarakat yang terkena pasung dengan peralatan informasi dan teknologi. "*Home Programme* untuk Anak Berkebutuhan Khusus" Esensi dari Inovasi ini meningkatkan efisiensi terapi anak berkebutuhan khusus dengan memandirikan elemen keluarga untuk dapat berjalan bersama dalam melakukan perawatan anak berkebutuhan khusus di rumah sesuai dengan program terapi Poli Tumbuh Kembang Anak dan Remaja Rumah Sakit Jiwa di Kelurahan Menur.

Sedangkan di Jawa Tengah ada inovasi *Peluk My Darling* (Perawatan Luka Kusta Menyeluruh Dengan Garden Healing) di Unit Rehabilitasi Kusta RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah. Permasalahan yang muncul dalam perawatan luka kusta tidak hanya faktor penyakitnya saja, tetapi juga dampak yang secara tidak langsung diterima oleh pasien. Dampak yang lebih mengarah ke kondisi psikologis pasien ternyata tidak dapat diabaikan. Beban menderita penyakit kusta, pengobatan yang lama, gangguan fungsi tubuh, rasa tidak nyaman akibat luka adalah contoh kondisi yang dapat menurunkan kondisi

psikologis pasien.

Jika menengok penelitian terdahulu, sudah cukup banyak penelitian yang pernah mengulas mengenai inovasi sosial, utamanya penelitian yang dilakukan oleh negara-negara maju. Adapun penelitian lainnya, menekankan pada aspek lain seperti politik. Seperti apa yang ditulis oleh Choi & Majumdar (2015) topik inovasi sosial semakin menjadi relevan dalam agenda politik seperti di Amerika Serikat di mana 'Kantor Inovasi Sosial dan Partisipasi Sipil' dan 'Dana Inovasi Sosial' telah dibentuk. Juga, Uni Eropa telah memprakarsai inisiatif 'Inovasi inovasi sosial' Eropa. Pusat inovasi sosial dan laboratorium inovasi sosial telah didirikan di universitas-universitas di seluruh dunia seperti Pusat Inovasi Sosial di Stanford Graduate School of Business di AS dan Laboratorium Inovasi Sosial di Sekolah Tata Kelola Humboldt Viadrina di Jerman. Berbeda dengan penelitian Choi, penelitian dari Antadze dan Westley (2001) penelitian ini mencoba membahas inovasi sosial sangat mempengaruhi pendapatan bagi perusahaan. Tentunya jika dilihat dari dimensi ekonomi.

Tidak hanya itu, bahkan organisasi sosial juga sering mengadakan konferensi internasional yang membahas tentang inovasi sosial. Dalam artikel yang ditulis dalam proyek "Tantangan Global dan Lokal di Slowakia: Sosial Innovations in the Context of Modernization, Gabriela (2012) menulis inovasi sosial dan penerapannya dalam praktik sosial. Artikel ini mencoba untuk mengkonseptualisasikan inovasi sosial dalam teori tentang modernisasi masyarakat. Hal ini didasarkan pada pemahaman sosiologis tentang inovasi sosial sebagai sumber perubahan sosial dan modernisasi sebagai contoh perubahan sosial. Pentingnya inovasi sosial meningkat seiring dengan dinamika perubahan yang tinggi di masyarakat modern akhir-akhir ini, dan dengan pertumbuhan diferensiasi struktural dan budaya, yang mendiversifikasi, membedakan, mengindividualisasikan dan meniadakan dunia sosial manusia. Konteks sosial telah mempengaruhi pemahaman modifikasi inovasi tidak hanya sebagai alat dan sumber produktivitas ekonomi dan daya saing, namun juga sebagai alat potensial untuk mencapai tujuan sosial dan kohesi sosial di masyarakat. Dimensi sosial lebih mementingkan posisi dan peran aktor sosial sebagai kendaraan inovasi. Solusi untuk masalah sosial dan peningkatan kemampuan pelaku sosial untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian telah menjadi syarat penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Tidak jauh berbeda dengan penelitian di negara maju dalam menelaah inovasi sosial para peneliti lokal di Indonesia juga melakukan penelitian inovasi sosial dengan menekankan berbagai sudut pandang. Seperti Pingkan & Hamzens (2007) membahas mengenai

inovasi sosial yang dilakukan oleh para nelayan. Strategi ini disebut sebagai strategi inovasi sosial pengembangan mutu SDM nelayan secara komprehensif, atau dapat disingkat dengan strategi inovasi sosial pengembangan mutu SDM nelayan. Sementara Sofianto (2013) mencoba mengulas mengenai persoalan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) belum berfungsi sebagaimana mestinya. Penelitian ini memfokuskan pada analisis kebutuhan penguatan dan peningkatan peran Pokdarwis di Desa Karangrejo untuk meningkatkan pengelolaan wisata mereka. Inovasi sosial berusaha mengembangkan daerah desa-desa di pedesaan mampu dijadikan wisata nasional.

Kendati demikian, penelitian di atas menekankan pada unsur tertentu yakni seputar ekonomi dan politik dalam keterkaitan inovasi sosial. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di atas, penelitian ini berusaha menelaah inovasi sosial dari beberapa sudut pandang pemerintahan daerah. Kajian ini akan membahas mengenai upaya apa yang telah dilakukan pemerintahan daerah dalam membantu masyarakat. Bagaimana inovasi itu dapat dilakukan dan bagaimana indeks pembangunan manusia dari hasil inovasi yang diperoleh.

Penelitian ini juga dianggap penting dan relevan dalam melihat konteks kekinian di Indonesia. Konteks pembangunan kota cerdas dimaksudkan dalam rangka kewajiban negara menyediakan pelayanan publik bagi warganya. Dalam pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga disebutkan Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.

Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dan memiliki relevansi yang tepat dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebab, sebagai Kementerian yang membina dan mengawasi pemerintahan di daerah, Kemendagri memiliki kewenangan mensinergikan dan mengkoordinasikan program pemerintah pusat yang dikeluarkan Kementerian/Lembaga sektoral agar sukses dalam pelaksanaannya di daerah (Hamudy 2015). Berdasarkan kebijakan di atas, pemerintah daerah melakukan berbagai pembenahan dan terobosan inovatif dalam melakukan reformasi pelayanan yang terkait dengan inovasi sosial.

## METODE

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Kalimantan Selatan dan Jawa Timur. Alasan pemilihan lokasi ini dikarenakan kedua daerah ini memiliki inovasi sosial dan terdapat pembeda yang jelas. Untuk melakukan prosedur riset, kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Pendekatan Kualitatif adalah sebuah pendekatan yang memberi peluang kepada peneliti untuk melakukan deskripsi subyek secara tajam, dan mendapatkan kedalaman informasi, serta kekayaan interpretasi (Somantri, 2005). Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan teknik pengambilan data berupa wawancara mendalam (*indepth interview*) dan observasi lapangan serta dianalisis dengan cara non statistik sesuai dengan sifat metode penelitian deskriptif dimana peneliti akan membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dari persoalan di pemerintahan daerah.

Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber data. Menurut Denzin (2012) triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Peneliti observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar untuk menghasilkan bukti atau data yang berbeda.

Keberadaan peneliti di Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, menjadikan peneliti memahami dan mendengar langsung percakapan dan cerita Kepala Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), berdiskusi dengan mereka, melakukan wawancara, membaca pemberitaan media lokal, serta memverifikasi data-data dan informasi pendahulu kepada stakeholder yang ada. Proses wawancara dilakukan pada sejumlah informan yang berada di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Komunikasi dan Informatika, maupun pemberitaan dari media cetak dan elektronik. Selain itu dilakukan penggalian arsip, data investasi dan tanya jawab dengan informan. Sedangkan pengolahan data dilakukan dengan cara reduksi data. seperti yang jelaskan (Berg, 2001) reduksi data ini dimaksudkan untuk mengarahkan perhatian pada fokus kebutuhan penelitian, menyederhanakan, dan mengubah data mentah menjadi bentuk yang lebih mudah dikelola. Reduksi data dilakukan peneliti dari sepanjang proses penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara geografis Kalimantan Selatan berada di bagian tenggara pulau Kalimantan, memiliki kawasan

dataran rendah di bagian barat dan pantai timur, serta dataran tinggi yang dibentuk oleh Pegunungan Meratus di tengah keragaman hayati. Pusat pemerintahan daerah berada di Kota Banjarmasin dan tercatat memiliki luas 37.530,52 km<sup>2</sup> dengan populasi hampir 3,7 juta jiwa. Provinsi ini memiliki kontur kawasan pada dataran rendah dengan tekstur tanah berupa lahan gambut hingga rawa-rawa sehingga kaya akan sumber keanekaragaman hayati satwa air tawar. Adapun Kawasan dataran tinggi sebagian masih merupakan hutan tropis alami dan dilindungi oleh pemerintah. Adapun secara demografis, provinsi ini mempunyai 11 kabupaten dan 2 kota. sedangkan komposisi masyarakatnya merupakan mayoritas penduduk etnis Banjar (74,34%) yang terdiri atas 3 kelompok, yaitu Banjar Kuala, Banjar Pahuluan dan Banjar Batang Banyu. Etnis terbesar kedua yaitu etnis Jawa (14,51%) yang menempati kawasan transmigrasi.

Sedangkan Provinsi Jawa Timur merupakan sebuah provinsi di bagian timur Pulau Jawa, Indonesia. Ibu kotanya terletak di Surabaya. Luas wilayahnya 47.922 km<sup>2</sup>, dan jumlah penduduknya 42.030.633 jiwa (sensus 2017). Jawa Timur memiliki wilayah terluas di antara 6 provinsi di Pulau Jawa, dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Selat Bali di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Provinsi Jawa Tengah di barat. Mayoritas penduduk Jawa Timur adalah Suku Jawa, namun demikian, etnisitas di Jawa Timur lebih heterogen. Suku Jawa menyebar hampir di seluruh wilayah Jawa Timur daratan. Suku Madura mendiami di Pulau Madura, dan daerah Tapal Kuda (Jawa Timur bagian timur), terutama di daerah pesisir utara, dan selatan. Di sejumlah kawasan Tapal Kuda, Suku Madura bahkan merupakan mayoritas.

Keberadaan inovasi daerah merupakan tindak lanjut dari sebuah program dan kegiatan di masing-masing provinsi. Program inovasi daerah didasarkan pada Undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Inovasi daerah yang dimaksud adalah inovasi berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Disebutkan dalam Pasal 386 ayat 2 bahwa inovasi daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap kegiatan yang bersifat inovatif yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di Daerah dalam memajukan Daerahnya. Oleh karena itu Perlu adanya upaya memacu kreativitas Daerah untuk meningkatkan daya saing Daerah (Pemerintah Republik Indonesia 2014).

Lebih lanjut untuk mewujudkan peningkatan

daya saing daerah, pemerintah juga menerbitkan tentang Pemerintahan Daerah salah satunya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan inovasi di bidang tata kelola pemerintahan. Inovasi Daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Inovasi layanan pemerintahan merupakan ide kreatif teknologi atau cara baru dalam teknologi layanan pemerintahan atau memperbaiki yang sudah ada di bidang teknologi pelayanan atau menciptakan terobosan atau penyederhanaan di bidang aturan, pendekatan, prosedur, metode, maupun struktur organisasi pelayanan yang manfaat hasilnya mempunyai nilai tambah baik dari segi kuantitas maupun kualitas pelayanan. Sebagaimana yang telah di amanatkan Peraturan Pemerintah (PP) 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, bahwa pada Pasal 6 huruf a kriteria inovasi daerah mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi.

#### **Inovasi Dalam Menekan Angka Kematian Bayi**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah, inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemda. Agar tujuan tersebut tercapai, maka sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Provinsi Kalimantan Selatan mencoba merintis inovasi di bidang sosial guna untuk meningkatkan pelayanan publik. Inovasi Daerah yang telah diciptakan merupakan inovasi dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin. RSUD Ulin adalah rumah sakit kelas A Pendidikan yang berada di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan dan merupakan rumah sakit rujukan di Kalimantan Selatan. RSUD ini menangani beberapa layanan dan penelitian penyakit seperti pelayanan Traumatologi, Pelayanan Kanker Terpadu, Pelayanan Ginjal & Hemodialisa Pelayanan Mata Terpadu, Pelayanan Lansia Terpadu, Pelayanan Gastrohepatobilizer terpadu, Pelayanan Pelayanan Kosmetik & rekonstruksi, Pelayanan Jantung, dan Pelayanan Kesuburan.

Inovasi yang dilakukan di RSUD Ulin merupakan inovasi pada rumah sakit dengan membuat Alat Bantu Nafas Alternatif bagi Bayi atau dikenal dengan istilah *Babies Respiratory Distrees Recovery Device (BIRD)*. Inovasi ini dilatarbelakangi adanya tingkat kematian bayi yang tinggi karena gawat nafas. Alat bantu yang biasa digunakan pada saat bayi

mengalami gawat nafas adalah alat bantu nafas yang dapat memberikan tekanan positif yang berkelanjutan yaitu *continuous positive airway pressure (CPAP)*.

*CPAP* merupakan alat kesehatan yang biasanya digunakan oleh orang yang memiliki masalah pernapasan, seperti misalkan penyakit *sleep apnea*. Jenis penyakit ini merupakan penyakit pada seseorang dengan masalah pada gangguan tidur dimana terdapat jeda dalam bernapas. Saluran pernapasan yang terdiri dari hidung, mulut, dan tenggorokan memungkinkan aliran udara membawa oksigen masuk ke dalam paru-paru dan mengeluarkan karbondioksida dari paru-paru. Pada orang dengan masalah *sleep apnea* saluran pernapasan mengalami penyempitan atau menutup sepenuhnya sehingga memblokir aliran udara. Mesin *CPAP* bekerja dengan memberikan aliran udara bertekanan melalui selang ke hidung dan/atau mulut sehingga saluran pernapasan tetap terbuka. Tekanan udara yang diberikan tergantung pada tingkat keparahan *sleep apnea* yang dimiliki. Tekanan yang diperlukan biasanya ditentukan oleh dokter setelah meninjau studi semalam (*polysomnography*) di laboratorium tidur di bawah pengawasan.

Kendati begitu, alat *CPAP* merupakan alat kesehatan yang memiliki harga tidak murah. Saat ini RSUD Ulin memiliki jumlah alat *CPAP* yang terbatas. Harga dari satuan *CPAP* berkisar 92 Juta rupiah per unitnya. Sementara pasien di RSUD Ulin mencapai ribuan setiap tahunnya. Untuk mengatasi kesenjangan itu RSUD Ulin menciptakan inovasi dalam dunia kesehatan. Inovasi ini diberi nama *Babies Respiratory Distrees Recovery Device (BIRD)*. Inovasi *BIRD* yang dimunculkan oleh RSUD Ulin ini hanya membutuhkan biaya sekitar Rp 280.000. Dengan adanya inovasi ini, RSUD Ulin Banjarmasin dapat menekan angka kematian bayi akibat gawat nafas dari 15% pada tahun 2008 menjadi 9% pada 2014.

#### **Penanganan Inklusif Untuk Kaum Difabel**

Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuat Inovasi Administrasi Terpadu Manajemen (ATM) Pasung. Penanganan ini dilakukan pada kaum difabel khususnya penyandang keterbatasan mental. Kaum difabel merupakan seseorang yang memiliki keterbatasan fisik dan atau mental yang sifatnya merupakan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara layak atau normal.

Inovasi ATM Pasung ini dilaksanakan mulai tahun 2015 atau sejak dimulainya program Jawa Timur Bebas Pasung dan akan dilaksanakan secara terus menerus sampai tercapainya Jawa Timur Zero Pasung. Inovasi ini muncul ketika banyaknya masyarakat yang memiliki masalah dengan ODGJ. Beberapa masalah ODGJ misalkan skizofrenia. Skizofrenia disebut sebagai penyakit dengan terbelahnya (skizo) kepribadian/jiwa (frenia). Hal ini dikarenakan karena

ketidakharmonisan ketiga komponen mental yaitu pikiran, perasaan dan perilaku seseorang. Penyakit ini dapat disebut sebagai penyakit mental.

Data awal yang ada pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur saat pecanangan adalah sebanyak 764 orang yang dipasung, ternyata data terus berkembang sehingga ini membutuhkan pendataan yang menyeluruh terhadap pemasungan yang ada di Jawa Timur. Hingga saat ini data pasung yang ada di Jawa Timur sebanyak 2.378 orang dengan yang masih dipasung 459 orang. Pemasungan yang ada di masyarakat selalu fluktuasi artinya bahwa pemasungan yang dilakukan oleh keluarga skizofrenia terhadap penderita skizofrenia selalu terulang dan terulang, dimana setelah dilakukakn pembebasan, perawatan dan rehabilitasi sosial dan akhirnya dikembalikan ke keluarga maka kasus pemasungan akan terulang kembali.

Dalam melaksanakan ATM Pasung setidaknya terdapat Pendamping Pasung sebanyak 145 orang yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur, mereka melakukan verifikasi dan validasi data pasung serta pendampingan penderita skizofrenia. Pedamping pasung juga harus berperan sebagai *outreacher, mediator, enabler, motivator, dan advocator* bagi skizofrenia terpasung dan keluarganya. Tidak hanya menunggu dalam melakukan pembebasan pasung, tetapi “menjemput” untuk melakukan pembebasan pasung yang melibatkan Forum Pimpinan Daerah. Pembebasan pasung dapat dipantau melalui data yang online dengan website [www.epasung.dinsos.jatimprov.go.id](http://www.epasung.dinsos.jatimprov.go.id) dimana data sudah meliputi *by name, by address, by photo, by assessment*.

Inovasi ATM pasung dihadirkan dalam rangka Program Jawa Timur Bebas Pasung telah dicanangkan oleh Bapak Gubernur pada 20 Juni 2014 di Desa Kemuning, Kecamatan Sambiy, Kabupaten Ponorogo. Hingga saat ini masih banyak juga yang telah dilepas dan dirawat di rumah sakit jiwa, setelah sembuh dikembalikan ke keluarganya. Namun demikian timbul permasalahan yang sangat krusial. Ternyata sebagian besar keluarga memasung kembali mereka

setelah dibebaskan dan dirawat di RS Jiwa. Hal inilah yang membuat angka pasung di Jawa Timur tiap tahun terus meningkat.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan keluarga memasung kembali adalah Ketidakberdayaan keluarga (faktor ekonomi) untuk mengobati pasien pasca pasung, minimnya monitoring dan evaluasi, stigma masyarakat, sulitnya memperoleh pengobatan lanjutan, belum optimalnya sistem pendataan pasung yang terpadu dan komprehensif serta berkelanjutan .

### Kemajuan Pembangunan Daerah

Birokrasi berhubungan dengan organisasi masyarakat yang disusun secara ideal. Birokrasi dicapai melalui formalisasi aturan, struktur, dan proses di dalam organisasi. Begitu juga dalam bentuk bentuk inovasi. Penyebaran budaya inovasi atau proses difusi berlangsung ketika terdapat suatu tempat yang mana dapat digunakan untuk menyebarkan unsur kebudayaan. Dilihat dari data di pemerintahan daerah provinsi Kalimantan Selatandan Jawa timur masing masing memiliki fokus pengembangan bidang inovasi yang sama yaitu inovasi sosial.

Beberapa bukti digambarkan misalnya nilai dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah yang melakukan inovasi sosial memiliki IPM yang terus membaik. Memperhatikan tabel diatas beberapa kondisi memiliki kesamaan. IPM dari kedua provinsi terus mengalami kenaikan tiap tahunnya. Misalkan di provinsi Kalimantan selatan tahun 2013 nilai IPMnya sebesar 67,17. Nilai capaian lima tahun berikutnya naik menjadi 69,65. Adapun provinsi jawa timur pada tahun 2013 mencapai 67,55 dan lima tahun kemudian tahun 2017 naik menjadi 70,27. Tabel di bawah menunjukkan bahwa inovasi sosial dari pemerintahan daerah sangat mempengaruhi IPM dari sebuah daerah. Salah satu dimensi dasar IPM adalah Umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan [angka harapan hidup](#) saat kelahiran. Oleh karena itu kedua pemerintahan daerah di atas menyajikan beberapa inovasi untuk meningkatkan angka kelahiran dan

Tabel 1 Nilai IPM Provinsi Kalimantan Selatan dan Jawa Timur Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	Provinsi Kalimantan Selatan				
	2013	2014	2015	2016	2017
Nilai IPM	67.17	67.63	68.38	69.05	69.65
	Provinsi Jawa Timur				
	2013	2014	2015	2016	2017
Nilai IPM	67.55	68.14	68.95	69.74	70.27

Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Tabel 2. Nilai IPM Provinsi Kalimantan Barat dan Kep. Riau Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	Provinsi Kalimantan Barat				
	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Nilai IPM</b>	64.3	64.89	65.59	65.88	66.26
	Provinsi Kep. Riau				
	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Nilai IPM</b>	73.02	73.4	73.75	73.99	74.45

Sumber: www.bps.go.id

menekan angka kematian pada sebuah daerah.

Sedangkan Tabel 2 di atas adalah IPM dari dua provinsi diatas mengalami kenaikan tiap tahunnya namun tidak signifikan seperti Provinsi Kalimantan Selatan dan Jawa Timur yang sudah menerapkan inovasi sosial. table yang menunjukkan selama lima tahun nilai IPM tidak ada peningkatan sebesar 0,50 poin. Nilai ini adalah nilai effort (usaha keras) dari pencapaian sebuah indeks pembangunan manusia. Misalnya IPM pada provinsi Kalimantan Barat yang pada tahun 2015-2016 hanya naik 0,29 sementara Kalimantan Selatan pada rentang tahun yang sama naik sebanyak 0,67. Demikian juga yang terjadi pada provinsi Kep. Riau yang pada rentang tahun 2015-2016 hanya naik 0,24 sedangkan Jawa Timur pada rentang tahun yang sama mengalami kenaikan IPM sebanyak 0,79.

Ada beberapa perspektif dalam memahami inovasi sosial terutama pada lingkungan sebuah pemerintahan daerah. Pertama, inovasi sosial berorientasi manfaat, lebih luas dari sekedar orientasi keuntungan bagi misalkan pada tataran Badan Usaha Milik Daerah. Inovasi sosial diciptakan dalam rangka menawarkan solusi permasalahan sosial, ekonomi, lingkungan, dan membuka ruang kepada masyarakat kurang mampu untuk kelangsungan hidup masyarakat.

Inovasi sosial menciptakan sebuah Nilai (*created value*). Seperti apa yang diutarakan oleh Choi & Majumdar (2015) bahwa pemerintahan daerah dapat membantu pegawai yang berada di lingkungan pemerintahan daerah agar dapat memangkas pola pikir pesimis, enggan mandiri, takut mencoba, sukar berinvestasi dan penyakit mental-persepsi lainnya. Pemerintahan daerah yang melakukan inovasi sosial dapat membantu meningkatkan kapasitas apakah itu ketrampilan, pola pikir, metode, akses dan lain-lain. Pemetik manfaat tidak sekedar dapat meningkatkan penghasilan tetapi kapasitasnya pemerintahan daerah pun dapat meningkat juga.

Selain itu, inovasi sosial juga harus memikirkan tentang keberlanjutan (*sustainability*). bukan berorientasi pada output sekali program. Oleh karena

itu pemerintah daerah harus dapat memahami tanggung jawab sosial pemerintahan daerah. Inovasi sosial menyediakan banyak alternatif pemberdayaan kepada masyarakat yang siklusnya lebih panjang, berkelanjutan dan berjenjang. Sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat menyentuh lebih banyak pemetik manfaat. Selain itu inovasi sosial juga diharapkan dapat menjaga sebuah dinamika kehidupan agar adil dan sejahtera sehingga tidak ada jarak mencolok (*gap*) antara kelas atas, menengah dan bawah.

#### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Tuntutan inovasi daerah termuat secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Esensi terbitnya peraturan tersebut dijadikan dasar bagi organisasi pemerintahan untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Beberapa inovasi yang telah dibuat Provinsi Kalimantan Selatan dan Jawa Timur memperlihatkan bahwa dengan adanya inovasi sosial yang dilakukan Pemerintah Daerah berupaya mendorong kesejahteraan bagi kelompok rentan.

Keberpihakan pemerintahan daerah dalam menciptakan Inovasi Sosial didasarkan pada pemenuhan manfaat, bukan pada pemenuhan profit. Inovasi sosial dapat diartikan juga sebagai upaya pemerintah, daerah dalam memecahkan masalah di sebuah daerah bukan lagi dengan cara-cara lama. Di Kalimantan Selatan, pemerintah daerah berupaya untuk menekan angka kematian bayi. Sedangkan di Provinsi Jawa Timur menggunakan kebijakan inovatif dengan cara pemberian tindakan inklusif untuk kaum difabel.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Antadze, Nino; Westley, F. 2001. Making a Difference: Strategies for Scaling Social Innovation for Greater Impact Frances Westley and Nino Antadze A, 15(2), 2–20.
- Berg, B. L. 2001. Qualitative Research Methods For

- The Sosial Sciences. (Sarah L. Kelbaugh, Ed.) (4th ed.). United State of Amerika: California State University.
- Choi, N., dan Majumdar, S. 2015. *Sosial Innovation : Towards a Conceptualisation*. Springer India. <https://doi.org/10.1007/978-81-322-2071-8>
- Denzin, N. K. 2012. *Triangulation 2.0*. *Journal of Mixed Methods Research*, 6(2011), 80–88.
- Gabriela, L. 2012. *Sosial Innovations in the Context of Modernization 1*. This Article Was Written in Fulfilment of the Project “Global and Local Challenges in Slovakia: Sosial Innovation under the European Union's Internationalization” with the Support of the Research and Development Operation Programme Financed by the Europea, 12(3), 291–313.
- Hamudy, M. I. A. 2015. *Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak di Surakarta dan Makassar*. *Jurnal Bina Praja*, 7(2), 149–160.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pingkan, W., & Hamzens, S. 2007. "Strategi Inovasi Sosial Pengembangan Mutu Sumber Daya Manusia Nelayan". *Jurnal Penyuluhan*, 3(1), 1–10.
- Sofianto, A. 2013. *Peran Kelompok Masyarakat Dalam Penguatan Inovasi Sosial Di Desa Karangrejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang*. *Jurnal Bina Praja*, 5, 43–52.
- Somantri, G. R. 2005. "Memahami metode kualitatif". *Makara, Sosial Humaniora*", 9(2), 57–65. Retrieved from <http://journal.ui.ac.id/index.php/humanities/article/view/122/118>
- Tommy, F. A.; & Sigit, J. 1955. *Weblet Importer*. Yogyakarta: Jentera Wacana Publika. Retrieved from <http://www.worldcat.org/isbn/9798739000?loc=>
- Widiyono, I. dan S. 2017. "Pemberdayaan Peternak Marginal : Studi Kasus di Wilayah Banguntapan Bantul". *Indonesian Journal of Community Engagement*, 02(02), 163–174.



